

Serat Wedhatama: Pengajaran Kepemimpinan Birokrat Perempuan Surakarta

Setyasih Harini
Universitas Slamet Riyadi
setyasih.rini@gmail.com

Abstract

The people of Surakarta are part of the Central Java region that has local wisdom that is useful for everyday life. Serat Wedhatama which contains noble values that are important to be a leader is one of the local wisdoms that is important. useful for motivating women to dare to participate in politics as leaders. The presence of women as leaders is still a contradiction. On the one hand, the people of Surakarta expect the presence of a female political leader, but on the other hand, the strong influence of tradition makes people still believe that men are suitable to be leaders. This study aims to provide an overview of the leadership of female bureaucrats in Surakarta based on local wisdom. Women's leadership is based on the description of the noble values contained in Serat Wedhatama and their influence on women's political leaders. The theory of power, gender politics, and the concept of Serat Wedhatama are used to analyze the problem. This research is expected to contribute ideas positively to the stigma of society that still doubts women's political leadership. Second, this research is also expected to contribute to the development of gender and political studies. The data was obtained from the literature and interviews. Primary data were taken from interviews with a number of Surakarta residents who held public positions as village heads and sub-district heads. The results of this study see that Serat Wedhatama significantly becomes a form of local wisdom that contains noble values that are still relevant to be used and manifested in the leadership style of Surakarta public officials.

Keywords : Serat Wedhatama, Women Political Leadership, Surakarta Women'S Politic

Abstrak

Masyarakat Surakarta merupakan bagian dari wilayah Jawa Tengah yang memiliki kearifan lokal yang bermanfaat bagi kehidupan sehari-hari. Serat Wedhatama yang didalamnya berisi nilai-nilai luhur yang penting untuk menjadi pemimpin merupakan salah satu kearifan lokal yang bermanfaat untuk memotivasi perempuan agar berani berpartisipasi dalam politik sebagai pemimpin. Kehadiran sosok perempuan sebagai pemimpin masih menjadi kontradiksi. Di satu sisi, masyarakat Surakarta mengharapkan hadirnya sosok pemimpin politik perempuan, namun disisi lain kuatnya pengaruh tradisi menjadikan masyarakat masih percaya bahwa yang cocok untuk menjadi pemimpin adalah laki-laki. Penelitian ini bertujuan memberikan gambaran kepemimpinan birokrat perempuan Surakarta yang berbasis pada kearifan lokal. Kepemimpinan perempuan didasarkan atas gambaran nilai-nilai luhur yang terdapat dalam Serat Wedhatama dan pengaruhnya bagi pemimpin politik perempuan. Teori

kekuasaan, politik gender dan konsep Serat Wedhatama digunakan untuk mengalisis permasalahan. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan ide secara positif terhadap stigma masyarakat yang masih meragukan kepemimpinan politik perempuan. Kedua, melalui riset ini diharapkan juga memberikan kontribusi terhadap perkembangan studi gender dan politik. Data yang diperoleh berasal dari pustaka dan wawancara. Data primer diambil dari wawancara terhadap sejumlah Surakarta yang menduduki jabatan publik sebagai lurah dan camat. Hasil penelitian ini melihat bahwa secara signifikan Serat Wedhatama menjadi salah satu wujud kearifan lokal yang berisi nilai-nilai luhur masih relevan digunakan dan diwujudkan dalam gaya kepemimpinan pejabat publik Surakarta.

Kata kunci: Serat Wedhatama, Kepemimpinan Politik Perempuan, Politik Perempuan Surakarta

Masuk : 18 November 2020

Review : 20 November 2020 s/d 30 Desember 2020

Diterima : 1 Januari 2021

Co Author : Indah Novitasari/ indah.novitasari@uki.ac.id

PENDAHULUAN

Pemberdayaan perempuan sesuai dengan kapasitasnya untuk lebih berperan dalam proses pembangunan telah digagas secara internasional, salah satunya melalui Program Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development Goals). Program PBB tersebut yang dengan mottonya *Leave No One Behind* mengupayakan untuk maju bersama dengan mengurangi kemiskinan. Salah satu tujuannya yakni pada poin kelima menyatakan pencapaian persamaan gender dan pemberdayaan perempuan. Studi yang dilakukan oleh Kim, dkk (2016) melihat bahwa perempuan yang telah berumah tangga merupakan pihak yang memiliki beban ganda sekaligus beresiko besar dalam menjalani kehidupannya. Di sisi lain, Forum Ekonomi Dunia yang diselenggarakan pada tahun 2016 menyoroti ketidakadilan gender yang menyeruak dalam bidang pendidikan, kesehatan, partisipasi politik dan ekonomi.

Artikel ini menyoroti ketidakadilan gender dalam bidang politik yang disebabkan oleh beberapa alasan: pertama, tradisi kultural yang dipertajam oleh interpretasi dalam memaknai kaidah agama yang kemudian menempatkan

perempuan pada lini subordinat dibandingkan laki-laki. Kondisi ini berpengaruh terhadap pengambilan keputusan lebih digantungkan pada pundak laki-laki. Berbagai bidang kehidupan dalam ranah publik seperti ekonomi, sosial, politik bahkan privasi pun seperti pemilihan fashion atau kosmetik juga tergantung pada keputusan laki-laki. Kedua, akses perempuan terhadap ekonomi dan informasi sekalipun telah berkembang media sosial namun masih dikategorikan minim dibanding laki-laki. Akibatnya, perempuan masih mengalami kesulitan dalam meningkatkan daya tawarnya terhadap laki-laki. Ketiga, kurangnya rasa percaya diri dari perempuan karena rendahnya pendidikan atau faktor keluarga.

Di sisi lain, tujuan pembangunan nasional Indonesia adalah pembangunan sumber daya manusia seutuhnya. Kata seutuhnya dalam konteks tersebut menyoroti pada pembangunan keadilan gender antara laki-laki dan perempuan. Upaya untuk meningkatkan pemberdayaan perempuan secara legal formal guna mendukung tujuan pembangunan telah tersirat pada lima falsafah dasar negara Indonesia. Kelima falsafah tersebut adalah Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Garis-Garis Besar Haluan Negara. Pancasila sebagai falsafah hidup masyarakat Indonesia tidak membuat perbedaan hak dan kewajiban berdasarkan pada jenis kelamin. Pancasila memberikan kesempatan dan status yang sama dalam keluarga dan masyarakat kepada perempuan dan laki-laki. Undang-Undang Dasar 1945 pada pasal 27 juga memberikan jaminan kesamaan hak bagi seluruh warga, yang artinya tidak membedakan antara laki-laki dan perempuan.

Sesuai dengan tujuan pembangunan nasional tersebut, pemerintah telah memberikan ruang dan kesempatan kepada semua warga negara untuk mengisi posisi dalam berbagai bidang termasuk diantaranya pemerintahan. Kesempatan dan status yang sama antara laki-laki dan perempuan sesuai dengan amanat Pancasila menjadi alasan tersendiri bagi perempuan untuk berani mengisi posisi

yang ditawarkan oleh pemerintah. Perempuan diberi kesempatan untuk berani mendobrak tradisi dan berani keluar dari kungkungan keluarga agar bisa menunjukkan dirinya dihadapan masyarakat. Sejarah telah mencatat beberapa perempuan yang mampu menjebol kekuatan sosio kultural serta kekuatan historis sosial untuk menunjukkan kapasitasnya sebagai pemimpin. Dalam Kitab Negarakertagama menurut penuturan dari GPH. Dipo Kusumo (dalam wawancara 20 Agustus 2020) bahwa era Mataram Kuno sudah terdapat pemimpin perempuan yang menjadi pujaan rakyat yakni Dyah Sanggramawijaya. Potensinya sebagai pemimpin bukan hanya karena garis keturunan namun juga pengetahuannya yang luas sehingga diangkat sebagai seorang Perdana Menteri atau yang dulu dikenal sebagai Maha Menteri (Rakryan Mahāmantri) dengan gelar Rakryan Mahāmantri I Hino Sanggramawijaya Dharmaprasada Uttunggadewi.

Pemerintah telah mengeluarkan peraturan dengan Nomor 100 Tahun 2000 mengenai Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil (PNS) pada Jabatan Struktural. Dalam peraturan tersebut yang dimaksud dengan pegawai negeri sipil adalah jabatan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak Pegawai Negeri Sipil untuk memimpin suatu kesatuan organisasi negara. Dalam konteks normatif sudah terdapat jaminan perundang-undangan bahwa Aparat Sipil Negara (ASN) perempuan maupun laki-laki memiliki kesempatan yang sama untuk menduduki jabatan struktural asal memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan.

Surakarta sebagai salah satu pewaris Keraton Mataram hingga kini telah mengupayakan berbagai cara guna meningkatkan potensi perempuan agar bisa tampil sebagai pemimpin. Upaya tersebut bukan hanya sekadar kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah setempat namun juga dalam bentuk kebijakan. Program-program tersebut telah disosialisasikan secara kelembagaan sampai ke

tingkat kelurahan. Melalui sosialisasi tersebut harapannya masyarakat dari semua elemen bisa mengetahui kebijakan dan program pemerintah Kota Surakarta dalam membangun kepemimpinan perempuan yang berbasis pada kearifan lokal. Artinya nilai-nilai budaya setempat menjadi landasan dalam membangun kepemimpinan perempuan agar kedepannya muncul seorang pengambil keputusan yang baik dan amanah.

Keberhasilan organisasi atau lembaga sangat ditentukan oleh karakteristik pemimpinnya. Sehingga pemimpin menjadi tokoh kunci yang berperan penting dalam organisasi. Pemimpin menjadi aktor penggerak organisasi dan bertanggung jawab terhadap kelangsungan aktivitas dari organisasi yang dipimpinnya termasuk pencapaian tujuan agar lebih efektif dan efisien. Untuk menciptakan kepemimpinan yang efektif dipengaruhi oleh kepribadian pemimpin dalam mewujudkan hubungan manusiawi dengan orang-orang yang dipimpinnya. Pemimpin disebut efektif jika memiliki kemampuan untuk membuat keputusan yang diterima oleh seluruh anggota yang dipimpinnya sebagai hasil dari keputusan bersama (Olivianti, 2014).

Gaya kepemimpinan seorang pemimpin menjadi menarik untuk dilihat mengingat pada titik inilah seorang pemimpin bisa memajukan anggota yang dipimpin guna mencapai tujuan atau target yang telah dirancang sebelumnya. Gaya kepemimpinan yang biasa digunakan oleh para pemimpin adalah kharismatis, paternalistis, militeristis, otokratis, *laissez faire*, populistis, administratif, dan demokratis. Beragamnya gaya kepemimpinan tersebut menjadi sebuah cara untuk menunjukkan bagaimana pemimpin berhubungan dengan anggota yang dipimpinnya dalam sebuah organisasi. Gaya kepemimpinan tersebut sekaligus sebagai cara bagi seorang pemimpin untuk menyelesaikan masalah dan mengambil keputusan. Oleh karena itu bagi seorang pemimpin, gaya

kepemimpinan yang dominan akan diterapkan dan disesuaikan dengan situasi dan kondisi yang dihadapi guna menyelesaikan permasalahan organisasi yang dipimpinnya serta mengambil keputusan yang sesuai dengan kepentingan dari organisasi atau kelompok yang dipimpinnya.

Berdasarkan pada uraian sebelumnya maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk melihat lebih lanjut kepemimpinan birokrat perempuan Surakarta yang didasarkan pada nilai-nilai tradisi Jawa (Serat Wedhatama). Nilai-nilai moral kepemimpinan yakni Serat Wedhatama merupakan salah satu karya sastra dari Mangkunegara IV sebagai pewaris kerajaan Mataram yang menjadi cikal bakal dari Kraton Mangkunegaran dan Kasunanan yang ada di Kota Surakarta. Dalam tulisan tersebut dinyatakan kriteria menjadi sosok pemimpin yang baik bukan semata-mata mencari kekuasaan, mengatur, memerintah dan mengendalikan orang lain namun sebaliknya. Pemimpin adalah sosok yang mau melayani, sepenanggungan bersama dengan orang-orang yang berada dalam lingkungan kepemimpinannya.

KAJIAN PUSTAKA

Eksplorasi lebih jauh terkait kepemimpinan tidak dapat dilepaskan dari kekuasaan sebagai faktor pendorong sekaligus tujuan yang ingin diraih bagi seseorang dalam sebuah jabatan. Kekuasaan, meminjam dari pemikiran Michel Foucault dalam pemikiran sosiologi politik dipahami sebagai kualitas, kapasitas atau modal untuk mencapai suatu tujuan tertentu dari pemiliknya. Di sini, Foucault bukan hanya semata-mata memberikan gambaran tentang kekuasaan sebagai properti, perolehan atau hak istimewa yang digenggam oleh sekelompok kecil masyarakat dan yang bisa terancam bahkan mengalami kepunahan.

Kekuasaan juga tidak dipahaminya sebagai hasil dari tindakan negatif yang dilakukan oleh sekelompok kecil masyarakat dalam bentuk represif dan koersif. Kekuasaan juga tidak semata-mata diartikan sebagai dominasi kelas tertentu berdasarkan atas manipulasi ideologi atau penguasaan atas ekonomi seperti dalam gagasan Karl Marx terhadap kelas lain juga bukan dimiliki karena dipengaruhi oleh karisma dari kelompok tertentu seperti pemikiran Max Weber (Komahi, 2017). Foucault justru memberi penekanan bahwa kekuasaan itu positif dan produktif dalam bentuk relasi atau jaringan yang memberikan manfaat bagi masyarakat. Relasi sosial yang terbentuk lebih didasarkan pada wacana kebudayaan atau politisasi kebudayaan dan kekuasaan yang sah dan legitimate. Dengan demikian kekuasaan dalam konteks ini dapat diandaikan sebagai dominasi simbolik, dominasi kekuasaan, dan institusi kekuasaan, yakni yang terdapat pada ranah relasi ekonomi, sosial, dan politik (Lash, 2007).

Konsep kekuasaan terkesan masih bias antara terlihat dan tidak terlihat. Ketika seseorang mencari kekuasaan melalui jaringan relasi sosial dalam masyarakat maka proses pencarian yang terjadi mengalami pergeseran dari yang semula tidak terlihat menjadi terlihat yang diwujudkan dengan tujuan menduduki jabatan politik (Shokri, 2017). Sementara sepanjang sejarah, para ahli mengidentifikasi kekuasaan sebagai konsep tunggal yakni sebagai bentuk dari dominasi (Dahl, 1957), kebebasan (Foucault, 1982) dan pemberdayaan (Morriss, 2009). Dahl (1957) menyebut kekuasaan sebagai dominasi ketika diterapkan dalam konteks politik dan hak asasi yang diwujudkan dalam peraturan. Banyak situasi kacau yang dipicu oleh munculnya pemerintahan diktator dan tiran yang mendominasi kehidupan politik dan hak asasi rakyat. Foucault (1982) menambahkan bahwa kekuasaan bisa dimaknai sebagai kebebasan untuk mendominasi, mengatur dan mengendalikan orang lain.

Sementara Morriss (2009) lebih melihat kekuasaan secara positif dengan menciptakan pemberdayaan bagi orang lain. Kekuasaan berkorelasi secara positif dengan kependudukan (Elias, 2008; Haugaard dan Ryan 2008). Ketiga ahli terakhir ini memberi gambaran kekuasaan seperti dalam hubungan keluarga (consensual language game) ketika sepupu “menguasai” saudaranya. Kata menguasai lebih diartikan sebagai kapasitas memberdayakan orang lain untuk menjadi anggota yang lebih baik dalam sistem sosial. Dari beberapa ahli tersebut dapat ditarik benang merah bahwa kekuasaan (power) dalam konteks politik masih memiliki konotasi positif sehingga bukan semata-mata sebagai suatu untuk menguasai atau mendominasi. Kekuasaan lebih dari itu yakni sebagai upaya seseorang untuk memberdayakan orang lain sesuai dengan kapasitas yang dimiliki agar lebih menjadi anggota sistem sosial yang bermanfaat.

Saat ini kekuasaan politik bukan hanya menjadi ruang gerak bagi kaum laki-laki namun juga perempuan. Dalam konteks politik, meminjam dalam sosiologi kepemimpinan menunjukkan bahwa kekuasaan yang diperoleh seseorang sampai menjadi pemimpin itu karena yakni prestasi dan tradisi. Prestasi biasanya dikaitkan dengan keahlian yang menonjol dan jasa yang diberikan kepada lembaga. Unsur prestasi biasanya dikaitkan dengan teori sosial yang menyatakan bahwa pemimpin hadir karena telah memiliki bekal pendidikan dan pengalaman yang lebih tinggi. Tradisi berkaitan dengan pewarisan dalam satu keturunan, dibebankan karena senioritas atau karena pertalian dalam bentuk lain. Unsur tradisi berkaitan dengan teori genetis bahwa pemimpin hadir karena telah memiliki bakat yang diwariskan oleh generasi sebelumnya baik secara langsung maupun tidak (Zulfa, 2004).

Perempuan berpolitik menjadi fenomena sosial yang masih menggelitik mengingat tradisi sosio kultural yang masih membayangnya untuk sulit bergerak.

Beberapa artikel menyebutkan bahwa perempuan yang menjadi pemimpin mampu mengubah suasana organisasi yang dipimpinnya, menjadi lebih luwes, tidak kaku dan tidak ribet (DeRue, 2011; Lemoine, Ishani Aggarwal & Laurends Bujold Steed, 2016). Perempuan menjadi pemimpin salah satunya ditampilkan dalam bidang politik. Perempuan berpolitik masih menimbulkan pro kontra dalam masyarakat. Perempuan berpolitik bisa diartikan sosok yang mampu menunjukkan kemampuan dalam lingkungannya sehingga layak disematkan posisi sebagai pemimpin.

Ketika sosok perempuan masuk dalam lingkungan politik dan menjadi pemimpin akan lebih menarik jika dikaitkan dengan gender. Dalam tulisan ini gender bukan hanya mengarah pada sosok perempuan sebagai salah satu jenis kelamin namun pada peran sosial. Faqih, (2003) menjelaskan bahwa gender merupakan hasil konstruksi sosial masyarakat yang terdiri dari sifat, sikap dan perilaku seseorang yang harus dipelajari untuk memahaminya. Dalam hal ini yang biasa dipelajari adalah sikap dan perilaku yang dianggap pantas karena jenis kelamin yang dimilikinya antara laki-laki dan perempuan. Di sini Faqih hendak menandakan bahwa untuk memahami gender memerlukan proses pembelajaran dalam waktu panjang yang diberikan oleh lingkungan keluarga, pendidikan sekolah yang formal maupun pendidikan non formal dalam lingkup keagamaan atau komunitas pertemanan.

Kalangan feminis melihat perempuan layak memiliki kesempatan untuk menjadi pemimpin. Model kepemimpinan feminis tidak lepas dalam kemampuannya untuk mengambil keputusan. Keputusan yang diambil lebih berwarna bukan bersifat manajerial namun, humanis serta membawa perubahan (Blackmore, 1993; Gosetti and Rusch, 1995; Joyce, 1987). Kepemimpinan perempuan biasanya menggunakan norma komunal dan memberi kehangatan

terhadap lingkungannya sedangkan laki-laki cenderung lebih percaya diri dan tegas (Eagly & Karau, 2002). Karena itu pemimpin perempuan seringkali lebih banyak didasarkan pada pertimbangan yang matang agar keputusan yang diambil sesuai dengan tujuan.

Pemimpin perempuan sangat diperlukan pada masa globalisasi (Shaed, 2018). Gaya kepemimpinan perempuan pada abad kedua puluh satu sekarang ini memiliki gaya yang lebih terbuka, demokratis, partisipatif, delegatif, mengutamakan manajemen team work, kolaboratif, mentoring, konsultatif serta gaya fleksibel sehingga mengurangi hirarki yang ketat (West, 2012; Arnold & Loughlin 2013; Peterson, 2018). Karakteristik pemimpin perempuan juga lebih memberikan ruang bagi partisipasi anggotanya, kurang otokratis, kurang tegas namun lebih kolaboratif dengan kelompok yang dipimpinnya (Peterson, 2018). Dari beberapa hasil pemikiran para peneliti tersebut dapat ditarik benang merah bahwa kepemimpinan feminis berbeda dengan maskulin. Pemimpin perempuan terkadang dinilai kurang tegas, lemah dan ragu-ragu namun dengan pertimbangan matang yang melibatkan orang-orang yang dipimpinnya maka tujuan tetap dapat tercapai. Pemimpin perempuan bahkan mampu melakukan negosiasi dengan pihak lain sekalipun dengan lawan dengan berlandaskan pada kehalusan budi.

Pemimpin perempuan dalam menjalankan aktivitasnya dipengaruhi oleh lingkungan. Lingkungan tersebut bisa berasal dari keluarga maupun masyarakat sebagai tempatnya bertumbuh dan berkembang. Unsur lingkungan masyarakat dalam bentuk nilai-nilai yang diyakini bersama akan diwariskan dari generasi ke generasi. Nilai-nilai yang tumbuh sebagai pengetahuan bersama dalam lingkungan masyarakat tersebut dikenal dengan kearifan lokal. Dahliani (2015) menjelaskan bahwa kearifan lokal sebagai serangkaian pengetahuan alami yang

dalam perkembangannya sebagai perpaduan antara faktor lingkungan dan pengalaman dari masyarakat itu sendiri. Masyarakat Jawa sebagai pewaris Kerajaan Mataram terlahir dengan sejumlah kearifan lokal dalam bentuk nilai-nilai moral.

Kangjeng Gusti Pangeran Adipati Arya (K.G.P.A.A.) Mangkunegara IV (1853 - 1881) sebagai penguasa Kerajaan Mataram waktu itu telah mengajarkan nilai-nilai positif bagi kehidupan manusia secara vertikal dan horisontal. Secara vertikal yang dimaksud adalah hubungan yang terbangun antara manusia dengan penguasa alam serta relasi diantara sesamanya dalam bentuk puisi yang dikenal dengan Serat Wedhatama. Secara umum Serat Wedhatama merupakan sastra wulang (*educational literature*) berisi lima tipe puisi yang dilagukan (tembang macapat) yakni Pangkur, Sinom, Pocung, Gambuh, dan Kinanthi sebagai ajaran moral untuk mempertahankan identitas sebagai masyarakat Jawa. Pada serat yang keempat tersebut juga menunjukkan menyatunya kehidupan manusia dengan Sang Pencipta, kedalaman pengertian yang dimiliki manusia sebagai suatu ciptaan tak ternilai menjadikannya untuk selalu melakukan sembah catur atau pemujaan yang tiada henti kepada Penciptanya guna keselamatan alam (Indhiarti, 2017).

Sebagai sebuah pengajaran untuk menjadi manusia Jawa yang ideal hendaknya memiliki kekuatan secara spiritual dan fisik. Kekuatan tersebut menyatu dalam wirya (kekuasaan), arta (kekayaan) dan winasis (kepintaran). Ketiga hal tersebut menjadi sarana untuk memberikan kebaikan kepada orang lain. Serat Wedhatama merekomendasikan kepada para pemimpin Jawa untuk memiliki perilaku dan kebijakan yang didasarkan pada nilai-nilai moral yakni satriya (pemberani, jujur, membela kebenaran dan keadilan), prasaja (sederhana), rila (iklas tanpa pamrih), setya budya (berilmu) dan agama ageming aji (taat pada

ajaran agama). Pemimpin tidak hanya memiliki kekuatan yang mampu mengusir atau menghalau angkara (kejahatan) namun juga menciptakan kebahagiaan dan kesejahteraan (kemakmuran) masyarakat (Widodo, 2016).

Dalam era sekarang, nilai-nilai moral dalam Serat Wedhatama masih memiliki relevansi. Orang Jawa saat ini secara sadar maupun tidak mengalami degradasi moral dalam bentuk penyakit secara fisik, depresi sosial, moral dalam berbagai tindakan yang menyimpang tatanan sosial. Untuk itu perlu mengembalikan orang Jawa terutama yang menjadi pemimpin agar lebih “njawani” dengan (1) Amemangun karyenak tyasing sesami (Sinom bait 1) yang artinya bekerja untuk melayani orang lain, (2) Wignya met tyasing sesami (Sinom bait 17) yang artinya membagi kebahagiaan kepada orang lain, dan (3) Mung ngenaki tyasing liyang (Kinanthi bait 13) yang artinya hanya membahagiakan orang lain (Sudrajat, 2017).

Nilai-nilai moral yang terkandung di dalam Serat Wedhatama memberi nasihat kepada para pemimpin bahwa kepemimpinan bisa diakui dan mendapat legitimasi dari rakyatnya ketika mampu memberikan pelayanan sehingga bisa membahagiakan orang lain. Serat Wedhatama juga mengajak para pemimpin agar tidak bertindak adigang (bertindak arogan karena posisi dan jabatan yang lebih tinggi sehingga meremehkan orang lain), adigung (bertindak arogan karena kepintaran dan ilmu yang dimiliki lebih tinggi), dan adiguna (karakter arogan dari ucapan yang tidak terkontrol).

Metode Penelitian

Riset dengan bentuk deskripsi-kualitatif menjawab pertanyaan penelitian dalam bidang sosial-politik karena metode ini mengumpulkan informasi yang mendalam dari beberapa sumber (Burnham, 2008). Pemilihan metode kualitatif

dilakukan guna mengeksplorasi dan memahami makna sejumlah individu atau kelompok orang dengan permasalahan sosial dan kemanusiaan. Metode kualitatif membangun sebuah analisis dan gambaran yang kompleks dan menyeluruh mengenai suatu masalah sosial. Analisis dan gambaran ini disusun berdasarkan pada penyelidikan yang mendalam dan pengumpulan informasi dari beberapa sumber yang dilakukan dalam kondisi alami fenomena tersebut (Jane, 2003). Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah primer dan sekunder dengan objek penelitian yang menyasar para birokrat perempuan yakni lurah dan camat Kota Surakarta. Peneliti memperoleh data dengan membangun komunikasi perempuan Surakarta yang menjadi pemimpin secara politis melalui wawancara. Narasumber dalam penelitian ini adalah Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan Kota Surakarta, perwakilan keluarga dari Kraton, dua camat dari Jebres dan Laweyan dan tiga lurah dari Sriwedari, Sumber dan Gandekan. Sebagai penelitian kualitatif maka data bisa berkembang setiap saat yang dapat diperoleh dengan dokumentasi dan literatur lainnya yang mendukung penelitian.

Hasil dan Pembahasan

Surakarta merupakan salah satu bagian dari Kraton Mataram. Sampai sekarang masyarakat Surakarta masih menjunjung tinggi nilai-nilai luhur yang diwariskan oleh Kraton Mataram. Kerajaan ini terbagi menjadi dua yakni Kraton Kasunan (Surakarta/Solo) dan Kasultanan (Yogyakarta) yang berdiri sejak tahun 1755. Tradisi budaya yang diturunkan oleh Mataram tersebut dalam konteks Kraton Surakarta merupakan “uwoh pangolahing budi” atau “pamesu budi” yang dalam Bahasa Indonesia diartikan sebagai hasil olah jiwa raga manusia. Pakarti lahir atau kegiatan ragawi manusia biasanya dilalui dengan tapa brata, bertapa, hamesu budi (perbuatan baik), dan manekung puja semedi (berdoa untuk mohon

petunjuk dari Tuhan). Upaya tersebut jika dikabulkan Tuhan akan terlihat dalam bentuk “sih wilasaning Pangeran” atau wahyu atau anugerah Illahi.

Keutamaan nilai-nilai luhur tersebut telah diwariskan secara terus menerus dalam masyarakat sehingga budaya Jawa dari Mataram masih tetap terlihat dalam kehidupan nyata sampai sekarang. Astuti (2015) menyatakan bahwa budaya merupakan unsur-unsur yang muncul dalam masyarakat sebagai bentuk pengorganisasian antarindividu. Proses tersebut melebur menjadi satu kelompok dalam rangka mempertahankan eksistensi manusia yang tinggal di dalamnya. Sebagai etnis terbesar maka Jawa memiliki banyak konsep yang dipercaya sebagai falsafah kehidupan. Falsafah tersebut sebagai pegangan kehidupan bagi masyarakat yang tinggal dalam wilayah tersebut yang tersebar dalam berbagai dimensi kehidupan.

Di antara falsafah kehidupan tersebut adalah nilai-nilai kepemimpinan yang ideal yang memiliki orientasi pada kekuatan supranatural. Dalam pandangan supranatural atau dalam konsep tradisional, raja sebagai pemimpin merupakan wakil atau titisan dari Tuhan. Dengan konsep seperti itu maka tugas seorang pemimpin adalah menciptakan situasi yang harmonis secara vertikal dan horisontal. Secara vertikal menggambarkan relasi yang terbentuk antara manusia dengan Tuhan sedangkan horisontal menjaga keseimbangan antara sesama manusia dan alam (Azhar, 2011).

Kepemimpinan Jawa kuno lebih didasarkan pada pandangan hidup, cara berpikir serta dasar moral yang diwariskan leluhur. Keberadaan pemimpin dalam konsep Jawa yang diwariskan Kerajaan Mataram berfungsi sebagai dinamisator dan penggerak sumber daya. Dengan demikian berhasil tidaknya seorang pemimpin tergantung pada gaya kepemimpinan. Pemimpin dalam konteks masyarakat Jawa dipengaruhi oleh sistem pemerintahan Mataram kuno seperti

pandangan hidup dan faktor ideologi, sosial, ekonomi, politik, budaya dan kepribadian. Nilai-nilai kepemimpinan yang bersumber dari budaya Jawa (Mataram) mengajarkan bahwa pemimpin adalah patron (pelindung), mangasah mingising budi (mengajarkan kehalusan dan kelembutan budi), menciptakan suasana kompromi dan harmonis terhadap keselarasan dan keseimbangan relasi yang tercermin dalam istilah *ana rembug padha dirembug*, mengembangkan humanisme, kepedulian dan solidaritas (Moertono, 1985).

Nilai-nilai kepemimpinan budaya Jawa tersebut telah terbangun sejak lama dan masuknya budaya asing yang begitu deras memungkinkan terjadinya erosi. Budaya asing yang masuk belum tentu sesuai dengan tata nilai kehidupan yang telah terbangun secara turun-temurun. Nilai-nilai kepemimpinan dalam budaya Jawa yang diwariskan oleh Kraton Kasunanan antara lain adalah kaprawiran (kepahlawanan) dan kaprayitnan (kewaspadaan). Sementara figur yang bisa memimpin dalam tradisi Jawa harus memiliki sikap *mengayomi* (melindungi) agar bisa memberikan perlindungan dan kenyamanan, *ngayemi* (mensejahterakan) terpenuhinya seluruh kebutuhan rakyat, serta *ajer* dengan melebur dan bersatu dengan orang yang dipimpinnya (Daswati, 2012).

Identitas perempuan yang berperan sebagai pemimpin seringkali dikaitkan dengan status yang dicapai (Karellaia, 2014). Dalam pandangan Bierema (2017) juga menekankan bahwa sosok pemimpin yang ideal dalam politik adalah laki-laki. Menurutnya laki-laki adalah pekerja riil yang memprioritaskan waktu, pikiran, dan tenaganya untuk pekerjaan. Sementara, perempuan lebih terpusat perhatiannya pada permasalahan domestik (rumah tangga) yang diistilahkan sebagai "ideal caregivers". Tantangan yang dihadapi bagi perempuan adalah upayanya untuk memperoleh identitas sosial baru yang merujuk pada konsep diri seseorang sebagai anggota komunitas. Identitas gender yang disandanginya

didasarkan pada karakteristik diri dengan membangun relasi dengan individu lain baik yang berjenis kelamin sama maupun lawan jenis. Dalam masyarakat Jawa menjadi tidak biasa ketika perempuan menjadi pemimpin. Bias gender akan terjadi ketika perempuan dianggap tidak mampu dan tidak sebanding dengan laki-laki. Terjalannya relasi antara laki-laki dan perempuan dengan baik ditandai ketika masyarakat mampu memahami budaya secara benar sebagai pedoman dalam kehidupan manusia. Ada lima karakteristik yang menjadi pedoman bagi pemimpin perempuan yakni terbuka terhadap pengalaman baru, menjaga stabilitas emosi, mendengarkan hati nurani, ramah kepada siapa saja, dan menjalin komunikasi (Lemoine, 2016). Dengan kelima hal tersebut menjadikan perempuan dapat berkerja sebagai pemimpin yang amanah terhadap masyarakat.

Pemerintah Kota Surakarta berupaya untuk meningkatkan pemberdayaan perempuan agar menjadi lebih berdaya secara personal. Perempuan yang berdaya bisa berkontribusi secara positif kepada orang lain. Perempuan yang berdaya bukan hanya mampu memenuhi kepentingannya sendiri tapi bentuk kontribusi yang diberikan kepada orang lain dalam bentuk partisipasinya dalam dunia politik. Dunia politik sampai sekarang masih dianggap oleh sebagian masyarakat sebagai bidangnya para lelaki. Perempuan Surakarta yang menjadi birokrat tidak semata-mata mengandalkan kekuasaan yang dipegangnya sebagai sarana untuk mencapai tujuan. Seperti yang dikatakan Foucault (2000), bahwa kekuasaan itu positif dan produktif dalam bentuk relasi atau jaringan yang memberikan manfaat bagi masyarakat. Relasi sosial yang terbentuk lebih didasarkan pada wacana kebudayaan atau politisasi kebudayaan dan kekuasaan yang sah dan terlegitimasi. Dengan demikian kekuasaan dalam konteks ini dapat diandaikan sebagai dominasi simbolik, dominasi kekuasaan, dan institusi kekuasaan, yakni yang terdapat pada ranah relasi ekonomi, sosial, dan politik (Lash, 2007). Artinya

bahwa dengan kekuasaan yang dimiliki oleh seorang pejabat publik menjadi kesempatan untuk mengembangkan relasi positif dalam lingkup politik, ekonomi dan sosial yang dibangun oleh pemimpin.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Dinas Pemberdayaan Perempuan Kota Surakarta menyampaikan bahwa Pemerintah Kota Surakarta saat ini masih gencar melakukan pemberdayaan perempuan. Program yang dilaksanakan tersebut cukup beragam misalnya dalam pencegahan tindak kekerasan dalam keluarga maka dibentuklah Pusat Pembelajaran Keluarga atau yang dikenal Puspaga. Program lainnya yang baru saja disosialisasikan adalah perempuan berdaya. Perempuan berdaya menjadi program untuk meningkatkan kolaborasi pentahelix berbasis komunitas dengan menggandeng unsur akademisi, pemerintah, swasta, masyarakat guna meningkatkan kualitas dan kesejahteraan bersama. Perempuan yang telah menjabat sebagai birokrat bukan tanpa perjuangan panjang.

Dalam sejarah Mataram telah dibuktikan beberapa perempuan yang berhasil menjadi pemimpin atau pembuat keputusan. Menurut salah satu keluarga Kraton Kasunanan Hadiningrat bahwa ada beberapa perempuan era kerajaan kuno yang menjadi pemimpin antara lain Putri dari Sinuhun Prabu Airlangga yang mendirikan kerajaan Kahuripan. Dyah Sanggramawijaya mendapat kedudukan sebagai Rakryan Mahāmantri atau Perdana Menteri dengan gelar Rakryan Mahāmantri I Hino Sanggramawijaya Dharmaprasada Uttungadewi. Demikian juga dengan Tribhuwana Wijayatungadewi atau Ratu Kencono Wungu yang diangkat menjadi Rajāputrī Majapahit. Ratu Kencono Wungu merupakan raja perempuan yang telah berhasil menghancurkan Kerajaan Chola dari India dan memerintah selama 20 tahun dengan bergelar Sri Tribhuwana Wijayatungadewi Maharajasa Jayawishnuwardhani yang kemudian

melahirkan Raja Hayam Wuruk. Dari uraian tersebut menunjukkan bahwa tradisi patriarkhi tidak menghalangi perjuangan dan langkah maju bagi perempuan untuk menjadi seorang pemimpin politik. Pemimpin merupakan seseorang yang memiliki kemampuan untuk menggerakkan dan memengaruhi orang lain untuk bergerak bersama guna mencapai suatu tujuan.

Ketiga lurah yang diwawancara menyampaikan bahwa menjadi pemimpin yakni birokrat hendaknya berkaca pada ajaran nilai-nilai luhur yang terdapat dalam Serat Wedhatama. Menurut ketiganya, sebagai orang Surakarta (Solo) lebih baik kalau menerapkan nilai-nilai moral yang telah diajarkan para leluhur. Dengan nilai-nilai moral yang bermanfaat bagi kebaikan hidup menjadikan tugas dan tanggung jawab yang diemban lebih bisa dijalani dengan baik. Serat Wedhatama bukan hanya sebatas puisi yang dinyanyikan sebagai hiburan tradisional. Warisan K.G.P.A.A Mangkunegoro IV tersebut mengajarkan bahwa untuk menjadi pemimpin itu bukan hanya di depan tapi juga di tengah dan di belakang. Artinya pemimpin bukan menggunakan kekuasaan dan kepercayaan rakyatnya untuk bertindak seenaknya sesuai kepentingannya tapi justru mendampingi rakyat yang dipimpinnya agar bisa maju.

Serat Wedhatama mengajarkan bahwa pemimpin memiliki kekuatan seperti matahari dan bulan yang memberi kehangatan dan menyinari kegelapan. Secara tidak langsung nilai-nilai moral tersebut mengajarkan bahwa seorang birokrat sebagai pemimpin masyarakat hendaklah berperilaku seperti seorang ksatria yang harus berani, jujur, membela kebenaran dan keadilan serta mengabdikan kepada rakyat. Kerendahan hati juga diperlukan bagi seorang pemimpin yakni birokrat dalam menjalankan tugasnya sehingga bisa berbuat baik bagi semua orang. Artinya Serat Wedhatama memberikan banyak bekal bagi para birokrat perempuan untuk menjalankan tugasnya sebagai abdi negara dan masyarakat.

Dari beberapa penuturan birokrat perempuan tersebut dapat ditarik benang merah bahwa masyarakat Surakarta masih menganggap sebagai kota budaya yang di dalamnya terdapat nilai-nilai moral yang sarat makna. Nilai-nilai luhur tersebut sebagai kearifan lokal yang tumbuh dan berkembang dari dulu era kerajaan hingga sekarang. Kemajuan teknologi yang pada gilirannya mempermudah masuknya budaya asing dan berakulturasi dengan tradisi lokal hendaknya semakin diperkuat dengan pertahanan yang berupa pengenalan kembali pada identitas. Identitas masyarakat melalui budaya dan tradisi khususnya yang berkaitan dengan nilai kepemimpinan masih relevan digunakan bagi birokrat masa kini.

Kesimpulan

Dari pemaparan sebelumnya dapat ditarik kesimpulan bahwa sebagai kota budaya yang kental dengan tradisi patriarki, pemerintah Surakarta telah memberikan peluang bagi perempuan untuk berperan secara politik. Melalui program pengarusutamaan gender dari pemerintah kota menjadi kesempatan bagi perempuan untuk berkiprah lebih banyak dalam birokrasi sebagai pejabat publik. Serat Wedhatama dengan nilai-nilai luhur memberikan inspirasi dan motivasi bagi perempuan pejabat publik untuk menjadi pemimpin yang bukan hanya mencari kekuasaan, mengontrol dan mengendalikan orang lain. Serat Wedhatama sebagai sebuah karya sastra justru memberikan bekal dan wawasan moral tentang kepemimpinan. Nilai-nilai moral yang terdapat dalam Serat Wedhatama bisa menginspirasi perempuan untuk lebih berperan dalam politik praktis guna membangun daerah dan memajukan kaumnya.

Daftar Pustaka

- Arnold, K.A., & Loughlin, C. (2013). Integrating Transformational and Participative Versus Directive Leadership Theories. *Leadership & Organization Development Journal*, 34(1), (67-84).
- Astuti, Triandini Tri, Yogi Pasca Pratama, (2015). Kraton: Menjaga Perempuan, Menjaga Kebudayaan (Studi Kasus Abdi-Dalem Perempuan Kraton Kasunanan Surakarta), *Jurnal Ilmu Ekonomi Pembangunan (JIEP)* Vol. 15, No. 2, (90-104).
- Azhar, Iqbal Nurul, (2011). Falsafah Kepemimpinan Bangsa dalam Paribasan Jawa (Aksioma Budaya yang Mulai Ditinggalkan), Dipresentasikan di Sidang Komisi C Pada Kongres Bahasa Jawa ke V yang diselenggarakan di Hotel JW Marriot Surabaya, Minggu-Rabu (27-30/11/2011).
- Bierema, Laura, L (2016). Women's Leadership: Troubling Notions of the "Ideal" (Male) Leader, *Emerging Issues of Worldviews on Women in Leadership*, Vol. 18(2) 119–136.
- Blackmore, J. (1993), Women's Educational Leadership in New "hard times", *Proceedings of the National Conference of Women in Leadership Program*, Edith Cowan University, Perth, (35-48).
- Burnham, P. (2008), *Research Methods in Politics, Political analysis*, 2nd ed, Palgrave Macmillan, Basingstoke.
- Dahl, Robert, (1957), *The Concept of Power*. *Behavioral Science* 2: (201-215).
- Dahlia, dkk (2015). Local Wisdom in Built Environment in Globalization Era, *International Journal of Education and Research*, 3(6), 157-166.
- Daswati, (2012). Implementasi Peran Kepemimpinan Dengan Gaya Kepemimpinan Menuju Kesuksesan Organisasi, *Jurnal Academica Fisip Untad* Vol.04 No. 01, (783-798).
- DeRue, D. S. (2011). Adaptive Leadership Theory: Leading and Following as a Complex Adaptive Process. *Research in Organizational Behavior*, 31(0), (125–150).
- Eagly, A. H., & Karau, S. J. (2002). Role Congruity Theory of Prejudice Toward Female Leaders. *Psychological Review*, 109, (573-598).
- Elias, N. (2008). Power and Civilization. *Journal of Power*, 1(2): (135-142).
- Faqih, Mansur, (2003). *Analisis Gender dan Transformasi Sosial*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Foucault M (1982) *The subject and Power*. The University of Chicago Press, *Critical Inquiry* 8: (777-795).
- Gosetti, P.P. and Rusch, E. (1995), *Reexamining educational leadership: challenging assumptions*", in Dunlap, D. and Schmuck, P. (Eds), *Women*

- Leading in Education, State University of New York Press, New York, NY, (11-35).
- Haugaard, Mark dan Kevin Ryan, (2012). Power, Social and Political Theories of, *Journal of Political Power, Development of the Field*, Chapter 2, (1-15).
- Indhiarti, Tantri Refa, Sri Utami Budi dan Indah Winarni, (2017). Revealing Javanese Identity of Prayer in Wedhatama through Semantic Proposition, *Jurnal UMS, Kajian Linguistik dan Sastra*, Vol 2, No. 2, (111-125).
- Jane, Ritchie & Jane Lewis, (2003). *Qualitative Research Practice: A Guide for Social Science Students and Researchers*, London: Sage Publications
- Joyce, M. (1987), "Being a feminist teacher", in Lawn, M. and Grace, G. (Eds), *Teachers: The Culture and Politics of Work*, The Falmer Press, London, (67-89).
- Karelaia, Natalia & Laura Guill en, (2014). Me, a Woman And a Leader: Positive Social Identity And Identity Conflict, *Organizational Behavior and Human Decision Processes* 125, 204–219.
- Kim, Eun Mee, (2016). Gender and Sustainable Development Goals, *Global Social Policy*, Vol. 17 (2), (239–244).
- Komahi, Umar, (2017). Teori Kekuasaan Michel Foucault: Tantangan Bagi Sosiologi Politik, *Jurnal Al-Khitabah*, Vol. III, No. 1 (117-133).
- Lash, Scott. 2007. —Power after Hegemony; *Cultural Studies in Mutation? II. Theory, Culture and Society*, Vol. 24 (3): (55-78).
- Lemoine, James, et.al (2016). When Women Emerge As Leaders: Effects Of Extraversion And Gender Composition In Groups, *The Leadership Quarterly* XXX, (1-17).
- Morriss P (2009) *Power and Hegemony*. Sage Handbook of Power. Sage Publication Ltd., London.
- Moertono, Soemarsaid. (1985). *Negara dan Usaha Bina Negara di Jawa masa Lampau*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Olivianti, Beby dan Lala M Kolopaking, (2014). Hubungan Gaya Kepemimpinan Lurah dengan Kualitas Pelayanan Kelurahan, Studi di Kelurahan Lenteng Agung Jakarta Selatan, *Sodality: Jurnal Sosiologi Pedesaan*, Vol. 02 No. 03, (135-145).
- Peterson, H. (2018). From "Goal-orientated, Strong and Decisive Leader" to "Collaborative and Communicative Listener". Gendered shifts in Vice-Chancellor ideals, 1990 - 2018. *Educ. Sci.*, 8(90), 1-17
- Shaed, Maslina Mohammed, (2018). Participative Management Theory and Feminist Leadership Style, *GEOGRAFIA OnlineTM Malaysian Journal of Society and Space* 14 issue 4 (332-345)

- Shokri, Mahdi, (2017). What is Political Power? (Theory of Political Consciousness and Integrated Concept of Power), *Arts Social Sci J*, Volume 8, Issue 3, (1-8).
- Sudrajat, dkk, (2017). Moral Values of Javanese Leader in Serat Wedhatama, *Asian Social Science*; Vol. 14, No. 3, (49-54).
- West, M.A. (2012). *Effective Teamwork: Practical Lessons from Organizational Research* (3rd). West Sussex, United Kingdom, John Wiley & Sons.
- Widodo, Sahid Teguh, (2016). The Concept of a Social Organism: The Response of Javanese Society to Modernism in the Serat Wedhatama by Kangjeng Gusti Pangeran Adipati Arya (K.G.P.A.A.) Mangkunegara IV, *Pertanika J. Soc. Sci. & Hum.* 24 (1): (519 - 526).
- Zulfa, Kholid (2004). Belenggu Kepemimpinan Perempuan dalam Ranah Politik, *Jurnal Muzawa*, Vol 3, No. 1 (67-78).